

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Sensitivitas Etika

Dalam banyak hal, pembahasan mengenai etika tidak terlepas dari pembahasan mengenai moral. Suseno (1987, p. 14) mengungkapkan bahwa etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan menurut Karl Barth mengungkapkan bahwa etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (*mos*), dimana keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). *Sitte* dalam perkataan Jerman menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, suatu konstansi (kelumintuan) tindakan manusia. Karenanya secara umum etika atau moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang moda-moda tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia (dikutip dalam Rianto, 2008).

Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas. Yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Etika, pada dasarnya adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Oleh karena itu, perilaku etika berperan melakukan 'apa yang benar' dan 'baik' untuk menentang apa yang 'salah' dan 'buruk'.

Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.

Karena didasarkan pada konsep sosial dan keyakinan perorangan, etika dapat bervariasi dari satu orang ke orang lainnya, dari satu situasi ke situasi lainnya, serta dari satu budaya ke budaya lainnya. Cakupan standar sosial misalnya, cenderung cukup mendukung beberapa perbedaan keyakinan. Tanpa melanggar standar umum suatu budaya, individu dapat mengembangkan kode etik pribadi yang mencerminkan beragam sikap dan keyakinan.

Apa yang membedakan perilaku etis dan perilaku tidak etis kadang kala bersifat subjektif dan mengundang perbedaan pendapat. Untuk dapat menentukan suatu tindakan apakah etis atau tidak etis digunakan model tiga langkah yang disederhanakan, yakni :

1. Mengumpulkan informasi faktual yang relevan
2. Menganalisis fakta-fakta untuk menentukan nilai moral yang paling tepat
3. Melakukan penilaian etis berdasarkan kebenaran atau kesalahan terhadap aktivitas atau kebijakan yang akan kita nilai tersebut

Menurut pendapat Michael Josephson (Sungkawati, 2009) , ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu:

1. Kejujuran, yaitu penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, terus-terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, tidak berbohong.
2. Integritas, yaitu memegang prinsip, melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian/ keyakinan, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan dapat dipercaya.
3. Memelihara janji, yaitu selalu menaati janji, patut dipercaya, penuh komitmen, patuh, tidak menginterpretasikan persetujuan dalam bentuk teknikal atau legalitas dengan dalih ketidakrelaan.
4. Kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan negara, tidak menggunakan atau memperlihatkan informasi rahasia, begitu juga dalam suatu konteks profesional, menjaga/ melindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, dan menghindari hal yang tidak pantas serta konflik kepentingan.
5. Kewajaran/ keadilan, yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, serta tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.
6. Suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, baik hati, belas kasihan, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain.

7. Hormat kepada orang lain, yaitu menghormati martabat orang lain, kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang, bersopan santun, tidak merendahkan dan mempermalukan martabat orang lain.
8. Warga negara yang bertanggung jawab, yaitu selalu mentaati hukum/ aturan, penuh kesadaran sosial, dan menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan.
9. Mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal, baik dalam pertemuan personal maupun pertanggungjawaban profesional, tekun, dapat dipercaya/ diandalkan, rajin penuh komitmen, melakukan semua tugas dengan kemampuan terbaik, dan mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi.
10. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki dan menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya serta selalu memberi contoh.

Ada sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika pada zaman kita semakin perlu (Suseno, 1987, p. 15). Pertama, kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Kedua, kita hidup pada masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Ketiga, tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini digunakan oleh pelbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Dan keempat, etika juga

diperlukan oleh kaum agama yang disatu pihak menemukan dasar kemandirian mereka dalam iman kepercayaan mereka.

Dengan mengkritik terlalu sederhananya persepsi umum atas pengertian etika yang hanya dianggap sebagai pernyataan benar dan salah atau baik dan buruk. Etika sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Proses itu sendiri meliputi penyeimbangan pertimbangan sisi dalam (*inner*) dan sisi luar (*outer*) yang disifati oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu. Etika secara umum didefinisikan sebagai studi isi (*conduct*) yang sistematis yang didasarkan pada prinsip pengembangan moral, mencerminkan pilihan dan sebagai standar tentang sesuatu hal yang benar dan salah (Adams, dikutip dalam Rianto, 2008).

Sensitivitas etika mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi konten etis dari suatu situasi tertentu (Spark and Hunt, dikutip dalam Sidani et al 2009). Jelas bahwa beberapa individu terlibat dalam kegiatan tidak etis meskipun pengetahuan mereka tentang sifat tidak etis dari perilaku mereka. Namun, beberapa orang memilih untuk membuat keputusan etis, bukan karena mereka memilih untuk berperilaku tidak etis, tetapi karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengenali bahwa situasi tertentu memiliki komponen alam etis.

Sensitivitas etis merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang adil, dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana keputusan dibuat selain variabel pribadi (Hunt dan Vitell, 1993; Patterson, 2001, dikutip dalam Sidani et

al, 2009). Sensitivitas etika adalah salah satu bagian dari proses pengambilan keputusan moral, yang terdiri dari:

- e. Kesadaran moral (*moral awareness*). Mengenai moral alamiah dari situasi yang ada.
- f. Keputusan moral (*moral judgement*). Membuat suatu keputusan yang secara moral benar dalam keadaan itu.
- g. Maksud moral (*moral intent*). Memutuskan menempatkan suatu nilai dalam norma moral daripada norma yang lainnya.
- h. Aksi Moral (*moral action*). Melibatkan dalam perilaku moral.

Ada 6 model dalam mengklarifikasikan model keputusan etis (Jones dikutip dalam Rianto, 2009), yaitu:

1. *Rest's Model*.

Ada empat komponen model ini untuk membuat keputusan etis oleh individu, dimana seorang agen moral dalam membuat keputusan harus mengenali isu moral yang ada, membuat penilaian moral (*moral judgment*), memutuskan untuk menempatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah moral di atas masalah yang lain (membentuk pandangan moral atau *moral intent*), dan bertindak terhadap masalah-masalah moral yang ada.

2. *Trevino's Model*.

Sebagai *person situation interactional model*. Dalam hal ini diawali dengan adanya dilema etika yang kemudian berlanjut ke tahap kesadaran (*cognition stage*). Penilaian moral dibuat ditahap kesadaran

ini yang kemudian dikembangkan oleh faktor-faktor individu dan situasi. Yang termasuk dalam faktor-faktor individu meliputi kekuatan ego (*ego strength*), ketergantungan lapangan (*field dependence*) dan kedudukan kendali (*locus of control*), sedangkan yang termasuk faktor-faktor situasi meliputi konteks tugas segera (*immediate job context*), kultur organisasi dan karakteristik dari pekerjaan.

3. *Ferrel & Gresham's Model.*

Dengan membuat sebuah kerangka kerja kontingen (*contingency framework*) untuk membuat keputusan etis dalam pemasaran. Dalam model ini isu etika atau dilema muncul dari lingkungan sosial atau budaya. Faktor kontingensi yang mempengaruhi si pembuat keputusan (*decision-maker*) adalah faktor-faktor dari dalam individu itu sendiri yang meliputi pengetahuan, nilai-nilai, perilaku dan tujuan maupun faktor-faktor dari organisasi yang meliputi kepentingan orang lain dan kesempatan. Keputusan yang dihasilkan dari proses ini, pertama menunjukkan pada perilaku (*behavior*) yang selanjutnya ke tahap evaluasi dari perilaku tersebut yang kemudian merupakan titik awal dari umpan balik terhadap faktor-faktor individu dan organisasi.

4. *Hunt's & Vitell's Model.*

Dimana, faktor-faktor lingkungan seperti budaya, industri, organisasi dan pengalaman seseorang mempengaruhi persepsi terhadap keberadaan masalah etis, alternatif-alternatif tindakan dan konsekuensi-konsekuensinya. Persepsi ini sejalan dengan norma

deontologis (*deontological norm*) dan evaluasi terhadap konsekuensinya. Konsekuensinya yang menunjukkan pada penilaian pada evaluasi deontologi dan teologi yang kemudian menunjukkan pada penilaian etis. Penilaian mempengaruhi tujuan (*intention*) sama halnya dengan tekanan situasi (*situational constraint*) yang mempengaruhi perilaku. Putaran umpan balik dimulai dari perilaku ke konsekuensi aktual dan kembali ke pengalaman seseorang (*personal experience*).

5. *Dubinsky and Loken's Model.*

Yang mendasarkan pada teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) dari Fishbein & Ajzen. Model ini diawali dengan perilaku umum (*behavioral beliefs*), hasil evaluasi (*outcome evaluations*), norma yang berlaku (*normative beliefs*) dan motivasi untuk menyetujui (*motivation to comply*). Dua variable pertama berpengaruh pada sikap etis dan perilaku tidak etis. Dua variabel yang terakhir berpengaruh pada norma subjektif pada perilaku etis dan tidak etis. Pada akhirnya sikap dan norma subjektif menunjukkan pada tujuan untuk bertindak secara etis dan tidak etis serta berpengaruh pada perilaku yang nyata. Tidak ada putaran umpan balik dalam hal ini.

Dari kelima macam model pengambilan keputusan etis ini menunjukkan bahwa tidak satupun dari model-model tersebut yang memasukkan karakteristik dari hal moral itu sendiri, baik sebagai variabel independen atau variabel moderat (yaitu variabel independen yang diduga atau dapat merubah hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen). Karena jika dari sintesa model tersebut dijadikan dasar untuk menilai perilaku etis, maka perilaku dan pengambilan keputusan etis dalam organisasi ini adalah sama atau identik satu dengan yang lain.

Model yang terakhir atau keenam adalah *Issue Contingency Model*. Argumen utamanya ialah pembuatan etika merupakan hal yang kondisional, yaitu tergantung atau sesuai dengan karakteristik-karakteristik dari masalah moral itu, yang secara keseluruhan disebut intensitas moral. Intensitas moral ini menjadi penentu yang utama dari model pembuatan keputusan dan perilaku etis (Nuryatno and Synthia dikutip dalam Rianto, 2008).

## 2.2. Jender dan Sikap Etis

Kata jender berasal dari bahasa Inggris berarti “jenis kelamin”. Dalam *Webster's New World Dictionary*, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 2007).

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Jender: an Introduction* mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua

ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian jender (*What a given society defines as masculine or feminin is a component of jender*). H. T. Wilson dalam *Sex and Jender* mengartikan jender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Agak sejalan dengan pendapat yang dikutip Showalter yang mengartikan jender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan jender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu (*Jender is an analitic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*) (Umar, 2007).

Kata jender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tetapi istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan istilah “jender”. Jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan (Umar, 2007).

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Jender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrat (Umar, 2007).

Isu mengenai jender dan hubungannya terhadap persepsi dan perilaku etika mungkin merupakan satu variable demografik yang mendapat perhatian besar lebih dari dua dekade lalu. Penemuan beberapa riset studi menunjukkan bahwa topik ini tidak menunjukkan dalam terminologi mengenai apakah pria dan wanita memiliki perbedaan dalam orientasi dan perilaku etika. Pada sisi lain ditemukan studi yang mengusulkan bahwa wanita pada dasarnya memiliki perbedaan orientasi etika dan perilaku potensial dibandingkan teman sekerja mereka yang berjenis kelamin pria. Sedangkan, ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengusulkan bahwa perbedaan yang tersebut dilakukan dalam fakta yang ada (Robin and Babin dikutip dalam Sidani et al., 2009). Ketidakberhubungan bermacam gagasan, ternyata banyak pelajar, sepanjang sejarah, memiliki pernyataan bahwa moralitas didasarkan pada jender (Tronto, dikutip dalam Sidani et al., 2009).

Kohlberg, didasarkan pada studi longitudinal diantara anak dan remaja, mengemukakan tiga langkah perkembangan moral, pra-konvensional, konvensional, dan post-konvensional, dengan masing-masing langkah berisi dua sub-langkah untuk total tujuh langkah. Kohlberg menunjukkan bahwa beberapa pria dengan cepat mencapai pada langkah ke-4 sedangkan wanita hanya mencapai pada tahap ke-3 (dikutip dalam Sidani et al., 2009).

Ada dua alternatif penjelasan mengenai perbedaan jender tentang perilaku tidak etis dalam bisnis (Ameen & Millanl, dikutip dalam Rianto, 2008). Pendekatan tersebut adalah pendekatan sosialisasi jender (*jender socialization approach*) dan pendekatan struktural (*structural approach*). Pendekatan

sosialisasi jender menyatakan bahwa pria dan wanita membawa perbedaan nilai dan perlakuan dalam pekerjaannya. Perbedaan ini disebabkan karena pria dan wanita mengembangkan bidang peminatan, keputusan dan praktik yang berbeda yang berhubungan dengan pekerjaannya. Pria dan wanita merespon secara berbeda tentang *reward* dan *cost*. Pria akan mencari kesuksesan kompetitif dan bila perlu melanggar aturan untuk mencapainya. Sedangkan wanita lebih menekankan pada melakukan tugasnya dengan baik dan lebih mementingkan harmonisasi dalam relasi pekerjaan. Wanita lebih condong taat pada peraturan dan kurang toleran dengan individu yang melanggar aturan.

Dalam pendekatan struktural, perbedaan antara pria dan wanita lebih disebabkan karena sosialisasi awal dan persyaratan peran. Sosialisasi awal diatasi dengan *reward* dan *cost* yang berhubungan dengan peran. Pada situasi ini pria dan wanita merespon secara sama. Pada pendekatan ini memprediksi bahwa pria dan wanita dalam kesempatan atau pelatihan akan menunjukkan prioritas etika yang sama (Rustiana dikutip dalam Rianto, 2008).

### **2.3. Usia dan Sikap Etis**

Dalam pembahasan demografi pengertian usia adalah umur pada saat ulang tahun terakhir (Statistics Indonesia, 2010). Kohlberg mengusulkan usia yang positif mempengaruhi perkembangan moral di mana orang dewasa terus berkembang sampai tahap-tahap perkembangan moral yang berbeda (dikutip dalam Sidani et al., 2009). Menurutnya kesadaran moral manusia mengalami perkembangan dari taraf yang sifatnya masih kekanak-kanakan sampai pada

kesadaran moral yang dewasa. Ia membedakan tiga tingkat dan enam tahap perkembangan. Penahapan kesadaran moral manusia oleh Kohlberg dibagi menjadi enam tahap yang secara implisit mengandung pengertian; bahwa makin tinggi tahap kesadaran moral seseorang, makin 'dewasa', 'matang' dan 'bertanggungjawab' dalam sikap-sikap moralnya. Menurutnya, tiga tingkat dan enam tahap ini berlaku universal dalam semua kebudayaan.

Didalam apa yang dikemukakan oleh Kohlberg (1995, p. 231) dalam teorinya mengenai tahap-tahap perkembangan moral, yaitu :

#### I. Tingkat Prakonvensional

Pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Akan tetapi hal ini ditafsirkan dari segi akibat fisik atau kenikmatan perbuatan (hukuman, keuntungan, pertukaran kebaikan). Atau dari segi kekuatan fisik mereka yang memaklumkan peraturan dan semua label tersebut. Terdapat dua tahapan pada tingkat ini.

##### Tahap 1 : *Orientasi hukuman dan kepatuhan*

Akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya, dinilai sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan

moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukum dan otoritas (yang terakhir ini adalah tahap 4)

*Tahap 2 : Orientasi relativis-instrumental*

Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang sebagai hubungan di pasar. Terdapat elemen kewajaran tindakan yang bersifat resiprosifitas dan pembagian sama rata, tetapi ditafsirkan secara fisik dan pragmatis. Resiprosifitas ini merupakan hal “Jika engkau menggaruk punggungku, nanti aku juga akan menggaruk punggungmu; dan bukan karena loyalitas, rasa terima kasih dan keadilan.

II. Tingkat Konvensional

Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau bangsa, dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Sikapnya bukan saja *konformitas* terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadapnya dan secara aktif mempertahankan, mendukung dan membenarkan seluruh tata tertib itu serta mengidentifikasikan diri dengan orang atau kelompok yang terlibat. Tingkat ini mempunyai dua tahap :

Tahap 3: *Orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi : Anak Manis”*

Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka. Terdapat banyak konformitas terhadap gambaran stereotip mengenai apa itu perilaku mayoritas atau “alamiah”. Perilaku sering dinilai menurut niatnya, ungkapan “dia bermaksud baik” untuk pertama kalinya menjadi penting. Orang mendapatkan persetujuan dengan menjadi “baik”.

Tahap 4: *Orientasi hukum dan ketertiban*

Terdapat orientasi terhadap otoritas, aturan yang tetap dan penjagaan tata tertib sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri.

III. Tingkat Pasca-Konvensional, Otonom atau yang Berlandaskan Prinsip

Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Ada dua tahapan pada tingkatan ini :

Tahap 5 : *Orientasi kontrak sosial legalistis*

Pada umumnya tahap ini amat bernada semangat utilitarian. Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis

dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat kesadaran yang jelas mengenai relativisme nilai dan pendapat pribadi bersesuaian dengannya, terdapat suatu penekanan atas aturan prosedural untuk mencapai kesepakatan. Terlepas dari apa yang telah disepakati secara konstitusional dan demokratis, hak adalah soal “nilai” dan “pendapat” pribadi. Hasilnya adalah penekanan pada suatu pandangan legal, tetapi dengan penekanan pada kemungkinan untuk mengubah hukum berdasarkan pertimbangan rasional mengenai manfaat sosial (dan bukan membekukan hukum itu sesuai dengan tata tertib gaya tahap 4). Diluar bidang hukum, persetujuan dan bebas kontrak merupakan unsur pengikat kewajiban. Inilah “moralitas resmi” dari pemerintah dan perundang-undangan Amerika Serikat.

*Tahap 6 : Orientasi Prinsip etika Universal*

Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada kompeherensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis (kaidah emas imperatif kategoris) dan mereka tidak merupakan peraturan moral konkret seperti Kesepuluh Perintah Allah. Pada hakikatnya ini adalah prinsi-prinsip universal keadilan,

resiprosivitas dan persamaan hak asasi manusia serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi individual.

#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah penelitian yang mungkin benar atau salah. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Antara lain penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sidani et al (2009) dengan judul “*Jender, age, and ethical sensitivity: the case of Lebanese workers*”. Hasil dari penelitian tersebut yang akan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sidani et al menunjukkan bahwa ada ditemukannya sensitivitas etis hanya empat dari 18 situasi dimana dalam semua kasus perempuan lebih sensitif dibandingkan laki-laki untuk isu-isu etis. Peterson et al. (2001) menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan secara biologis cenderung untuk bertindak dengan cara tertentu dan kecenderungan ini membuat mereka berperilaku lebih etis atau kurang etis dalam situasi tertentu (dikutip dalam Sidani et al 2009).

Lebih jauh Rianto (2008), menemukan adanya perbedaan sensitivitas/kepekaan etis secara signifikan antara mahasiswa akuntansi pria dan mahasiswa akuntansi wanita.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 :

Terdapat perbedaan sensitivitas etika karyawan administrasi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan jender.

Hasil penelitian yang dilakukan Sidani et al (2009) menunjukkan dari segi umur terdapat beberapa perbedaan etika antara responden di beberapa situasi. Barnett dan Karson (1989) menemukan bahwa responden yang lebih muda bertindak kurang etis di skenario etika dibandingkan dengan responden yang lebih tua (dikutip dalam Sidani et al 2009). Wimalasiri (2001) menemukan perbedaan yang signifikan antara peserta yang lebih muda dan lebih tua (dikutip dalam Sidani et al 2009).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 :

Terdapat perbedaan sensitivitas etika karyawan administrasi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdasarkan usia.